



ISSN: 1858-2664

Desember 2006, Vol. 2, No. 4

## KAJIAN ANALITIK

### PERSPEKTIF ALTERNATIF PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Oleh: Mappamiring

Pembangunan ialah serangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara berencana dan sadar, yang dilakukan oleh suatu negara bangsa menuju modernitas untuk pembinaan bangsa (Siagian, 2003:4).

Tidak perlu diragukan bahwa Indonesia memiliki sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang beragam. Indonesia ialah negara kepulauan yang terbesar di dunia.

Keunikan ini, jika ditunjang oleh perencanaan, strategi dan kebijakan pengembangan yang efektif, dapat menjadi modal yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Optimalisasi pengembangan sumber daya wilayah atau daerah, melalui kombinasi kebijakan pembangunan nasional dan regional, yang didasari oleh agregasi kepentingan nasional sering menimbulkan masalah, terutama bagi daerah-daerah penghasil devisa bagi negara.

Cerlang budaya dan kearifan lokal, belum sepenuhnya terakomodasi dalam setiap kebijakan Pembangunan. Hal ini terjadi karena dominannya pendekatan *top down*, yang menggunakan birokrasi melalui pendekatan proyek yang kaku, sehingga menghambat partisipasi masyarakat.

Di pihak lain, pendekatan ini berpeluang menimbulkan korupsi, memasung nilai-nilai budaya, kegotong-royongan, konsep diri masyarakat, dan kearifan lokal, sehingga seluruh potensi yang dimiliki tidak terkoordinasi dan dapat dikembangkan secara optimal.

Selama ini alokasi proyek untuk pembangunan daerah masih didasarkan pada kepadatan penduduk. Akibatnya potensi sumberdaya alam yang tersebar diseluruh wilayah nusantara, terutama di Kawasan Timur Indonesia kurang mendapat perhatian. Potensi ini jika dikelola dengan baik, akan memperkuat landasan ekonomi nasional.

Selanjutnya paradigma pemerataan dan kemitraan dalam pembangunan yang selama ini diterapkan, perlu terus dioptimalkan agar dapat menghasilkan banyak manfaat, termasuk bagidaerah-daerah yang kurang padat penduduknya.

Dalam hubungan ini, pemangku-pemangku kepentingan pembangunan perlu mengenali secara obyektif kendala-kendala utama pembangunan yang ada, dan *leading sectors* di setiap daerah.

Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa konsep-konsep pembangunan yang dirumuskan melalui analisis SWOT masih belum tajam, sehingga solusi yang ditawarkan masih belum jelas. Jadi, masalah-masalah sosial, ekonomi, hukum, dan politik yang perlu diatasi untuk membangun kesejahteraan sosial secara menyeluruh masih belum teratasi dengan baik, sehingga masih perlu diagendakan.

Secara kronologis, penulis mencermati kebijakan pembangunan di beberapa daerah di Indonesia menjelang akhir era Orde Baru sampai ke era Orde Reformasi saat ini. Secara makro, sejak lama ada polarasi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Kedua

kawasan itu berbeda, terutama dalam ketersediaan infra-struktur.

Wacana ini masih perlu penulis kemukakan untuk merangsang tumbuhnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih tajam tentang kebijakan pembangunan. Wacana ini dikembangkan atas dasar:

1. pengamatan kemajuan pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
2. wawancara insidental dengan politisi, pembuat kebijakan pemerintah, pengusaha, akademisi dan tokoh masyarakat tentang sektor-sektor pembangunan tertentu.
3. kajian literatur tentang formulasi dan implementasi kebijakan pembangunan.

Kesenjangan yang terjadi akibat kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada kepadatan penduduk mengakibatkan timbulnya ketidak-adilan dalam pengembangan wilayah dan sumberdaya pembangunan di Kawasan Timur Indonesia, sehingga gagal menguatkan dasar ekonomi masyarakat.

Pendekatan pembangunan yang mengandalkan pada kapasitas birokrasi saja, tidak mampu mengembangkan partisipasi masyarakat secara optimal, karena tidak mengakomodasi cerlang budaya dan kearifan lokal dengan baik. Hal ini diperburuk oleh masih belum optimalnya tindak lanjut pemantauan dan evaluasi pembangunan untuk memperbaiki keadaan.

Secara umum perbedaan perkembangan wilayah dan pembangunan dikedua kawasan Indonesia itu timbul karena:

1. Potensi dan sumberdaya alam,
2. Implementasi pembangunan, dan
3. Dinamika penduduk dan perubahan sosial.

Perbedaan potensi dan sumberdaya alam merupakan sesuatu yang positif bila dikelola dengan kemitraan yang sejajar, dan saling mengisi. Dalam hubungan ini, otonomi daerah yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian daerah, memberikan kewenangan

kepada daerah untuk menciptakan akses bagi warganya untuk mengembangkan kemitraan.

Sayang hal tersebut belum terwujud, karena daerah tidak memiliki SDM yang berkualitas, modal, dan teknologi yang memadai. Selain itu, kelembagaan sosial, politik, ekonomi, hukum dll juga belum berkembang secara optimal di daerah.

Pembangunan, sebenarnya, tidak lain dari perubahan yang diinginkan di berbagai sektor kehidupan (White, 1987). Wilayah suatu negara sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan, karena wilayah memiliki potensi SDM maupun SDA untuk dikembangkan.

Jika pembangunan diartikan sebagai penentuan pilihan masa depan, atau realisasi potensi manusia (Gandhi dalam Bryan, 1987), maka setiap wilayah dan masyarakat akan memiliki ciri khas dalam pembangunan. Konsep diri individu, masyarakat, daerah, wilayah dan kawasan seharusnya dapat dijabarkan dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi pembangunan.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa pembangunan di kawasan barat Indonesia jauh lebih baik dari pada pembangunan di kawasan timur Indonesia. Hal ini timbul sebagai konsekuensi dari alokasi proyek pembangunan yang ditetapkan atas dasar jumlah penduduk. Kebijakan ini tidak berhasil membangun fundamen ekonomi rakyat yang kuat.

Akan lain halnya jika kebijakan alokasi proyek tersebut ditetapkan atas dasar luas wilayah. Kawasan Timur Indonesia, yang wilayahnya jauh lebih luas dan memiliki potensi maupun sumberdaya pembangunannya lebih bervariasi akan lebih berkembang. Fundamen ekonomi rakyat di kawasan itu akan lebih kokoh, dan sekaligus akan memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan politik nasional.

Untuk menyingkirkan kesan adanya pusat dan daerah pinggiran, dan adanya polarisasi kemajuan pembangunan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia, maka perlu pembangunan Infrastruktur diberbagai

sektor di KTI. Namun, perlu dipahami bahwa ada banyak kendala untuk membangun KTI. Karena itu niat baik pemerintah dan wakil-wakil rakyat di pusat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Disisi lain, *leading sectors* pembangunan termasuk perikanan dan kelautan, perkebunan, pertambangan, peternakan dan lain sebagainya di KTI cukup menjanjikan, jika dikelola dengan baik. Sektor tersebut dapat memperkuat fundamen ekonomi rakyat dan dapat meningkatkan perolehan devisa negara.

Secara geopolitik, perbedaan kawasan timur dan kawasan barat Indonesia yang selama ini sering menimbulkan isu kecemburuan sosial, dapat dipandang sebagai tantangan bagi keberhasilan pembangunan. Bagaimanapun, keberhasilan pengembangan Kawasan Timur Indonesia dapat mengurangi beban kependudukan di Kawasan Barat, terutama di Jawa. Melalui transmigrasi, tekanan kependudukan di Jawa dapat dikurangi dan pembangunan di KTI dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan itu dan di Indonesia.

Model di bawah menunjukkan saling hubungannya berbagai unsur yang perlu dikembangkan di Kawasan Timur Indonesia, yang sedikit atau banyak telah diulas pada bagian terdahulu maupun bagian berikut.

Wilayah yang begitu luas dengan potensi SDA yang memadai, sudah barang tentu dapat memberi kontribusi yang besar pada pengembangan ekonomi nasional. Namun demikian, hal ini akan terjadi, jika seluruh elemen bangsa menyadari pentingnya paradigma baru pembangunan yang spesifik daerah, tanpa meremehkan aspek kesatuan negara-bangsa, terutama untuk pengembangan Kawasan Timur Indonesia, yang masih tertinggal.

Selanjutnya, konsekuensi logis dari perbedaan wilayah itu ialah adanya perbedaan kemampuan dan perbedaan masalah yang dihadapi setiap wilayah. Karena itu paradigma mikro regional yang selama ini jarang kita

dengar termasuk keterbukaan wilayah untuk mengadakan kesepakatan dan kerjasama, menjadi sesuatu yang perlu terus ditingkatkan.

Ciri utama yang paling menonjol dalam mengkaji perbedaan wilayah ini antara lain ialah keseimbangan penduduk dan lingkungan pembangunan. Sebagaimana diketahui sebaran penduduk yang tidak merata merupakan ciri demografis Indonesia. Sebaran penduduk yang tidak didukung oleh lingkungan geografis dan pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks. Penduduk menjadi beban lingkungan maupun sebaliknya. Gejala seperti ini secara umum menandakan bahwa daya tampung suatu daerah telah terlampaui.

Pembangunan regional ialah bahagian integral dari pembangunan nasional. Sejak awal strategi pembangunan di Indonesia bertumpu pada pembangunan nasional. Ada harapan bahwa pada gilirannya hasil pembangunan nasional akan terdistribusi ke tingkat regional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa yang dianut pada awal strategi pembangunan adalah penerapan fungsi alokatif atau distribusi dalam perencanaan pembangunan nasional, yang dijabarkan lebih jauh dalam strategi pembangunan regional.

Bahwa perspektif perencanaan pembangunan Nasional tidak selalu dapat konsisten menopang pembangunan regional, hal ini telah banyak dikemukakan para ahli. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman wilayah menuntut adanya paradigma baru pembangunan skala regional. Pertanyaan selanjutnya mampukah setiap wilayah merumuskan suatu konsep di era otonomi daerah dengan segala konsekuensinya.

Karena itulah dikembangkan suatu paradigma baru pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah/wilayah. Paradigma tersebut ialah paradigma kemandirian lokal yang berorientasi pada kebutuhan tatanan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan, yang berbasis pada ketersediaan sumber daya setempat dan dikelola secara partisipatif oleh masyarakat (Radi A. Gani, 2002).

Sejalan dengan paradigma kemandirian lokal, pembangunan berkelanjutan menjadi suatu paradigma baru yang cocok untuk Indonesia karena dapat mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia (Salim, 1992). Dinamika penduduk dan perubahan sosial dapat direkayasa melalui program transmigrasi untuk menjadi penunjang pembangunan agar sumberdaya kawasan dapat menjadi pilar ekonomi nasional yang kokoh. Perubahan ini akan berdampak pada peningkatan daya saing global dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi kebijakan pembangunan ekonomi melalui industri, promosi ekspor dan industri substitusi impor dapat diwujudkan melalui dinamika penduduk dan perubahan sosial. Sebaran penduduk yang tidak merata dengan konsentrasi terbesar di Jawa, sumberdaya alam yang dominan diluar Jawa, dan luasnya kawasan diluar Jawa secara agregat memungkinkan peningkatan kemampuan nasional, sepanjang ada infrastruktur, dan pembelajaran berjalan normal.

Selain itu, kemajuan sosial ekonomi dan budaya di Jawa dapat menjadi sumber inspirasi bagi kemajuan luar Jawa. Prinsip kemitraan dan kerjasama antar wilayah dan kawasan yang selama ini belum optimal masih merupakan pekerjaan rumah yang cukup menantang terutama bagi pemerintah pusat.

Pemerintah perlu memfasilitasi pengurangan perbedaan wilayah itu dan mengembangkan potensi yang dapat saling menunjang menuju kepada konsep diri bangsa dalam kebersamaan untuk menciptakan pemerataan, keadilan dan percepatan pembangunan diseluruh kawasan. Kesenjangan yang terjadi selama ini dapat diatasi dengan jalan:

1. Membangun kepercayaan diantara pemerintah pusat dan daerah.
2. Percepatan pembangunan di kawasan tertinggal, khususnya daerah luar Jawa yang terisolir.
3. menjadikan pembangunan sektor kelautan sebagai unggulan.

## **Kesimpulan**

Sebagai akhir dari tulisan singkat ini maka perlu dikemukakan kembali pokok-pokok pemikiran untuk menopang pembangunan daerah atau wilayah di tanah air.

1. Kesenjangan dan polarisasi kawasan Indonesia Barat dan Timur memperlemah fundamen ekonomi, ketahanan nasional dan kesejahteraan rakyat.
2. Kemandirian dan kearifan lokal dalam pembangunan regional belum berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat.
3. Konsep diri yang didasari oleh kesadaran pada kendala utama dan sektor unggulan di wilayah timur belum melahirkan paradigma baru pembangunan yang efektif.
4. Sinkronisasi pembangunan sektoral dan pembangunan regional masih perlu dicermati terutama oleh birokrasi pemerintah.

## **Rujukan**

- White, Bryan dan C. G. Louis. 1988. *Manajemen Pembangunan Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Radi A Gani. 2002. *Menyongsong Abad Baru dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Salim, Emil. 1992. *Pembangunan Berkelanjutan Mencari Format Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Sondang P. 1989. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.